

ANALISIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019-2018

Rheno Arya Saputra¹, Farid Darmawan², Muh. Gibran Abdiel A³
Universitas Tidar

Email: rhenoputra1610@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang periode 2018-2019. Penilaian ini berfokus pada aspek-aspek utama seperti kondisi fiskal, kebijakan alokasi sumber daya, dan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu mengumpulkan data dari laporan keuangan resmi yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang. Kesehatan keuangan dinilai dengan mengevaluasi indikator keuangan utama seperti rasio likuiditas, solvabilitas, dan efisiensi. Tujuan dari penilaian ini adalah untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban keuangannya dalam jangka pendek dan jangka panjang. Selain itu, penilaian alokasi anggaran dilakukan untuk mengevaluasi kebijakan alokasi anggaran yang mendukung prioritas pembangunan daerah seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan sektor-sektor penting lainnya. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang tahun 2018-2019. Temuan-temuan ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah sendiri, masyarakat lokal, dan pemangku kepentingan lainnya, untuk mengambil keputusan dan menyempurnakan kebijakan terkait pengelolaan fiskal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan tingkat transparansi, akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Makna dari penelitian ini adalah untuk memberikan landasan bagi penyempurnaan kebijakan dan praktik pengelolaan keuangan publik di Pemerintah Daerah Bupati Magelang sekaligus memiliki pemahaman yang lebih komprehensif mengenai situasi keuangan daerah. Tujuannya adalah untuk mendukung upaya pembangunan berkelanjutan dan memajukan kebaikan bersama.

Kata Kunci :

Laporan Keuangan, Pemda Kabupaten Magelang, Analisis Keuangan, Rasio Keuangan

A. LATAR BELAKANG

Anggaran pemerintah negara bagian atau daerah, yang disebut anggaran pendapatan dan belanja daerah, merinci proyeksi pendapatan dan rencana belanja yang diharapkan. APBD terdiri atas dua komponen utama, yaitu Anggaran Pendapatan Daerah dan Anggaran Pendapatan Daerah. Anggaran pendapatan daerah mencakup berbagai sumber pendapatan daerah, antara lain: Pajak daerah, retribusi daerah, dll. Saat ini, anggaran daerah mencakup berbagai pos pengeluaran seperti biaya pegawai, biaya barang, dan biaya investasi.

Perencanaan dan penyusunan anggaran belanja daerah (APBD) melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti kepala daerah, tim anggaran pemerintah daerah (TAPD), dan dewan perwakilan rakyat daerah. TAPD mempunyai peranan sentral dalam pembentukan APBD yang dibahas dan disetujui oleh dewan perwakilan rakyat daerah. Selain itu, ketika mengembangkan APBD, kebutuhan dan prioritas daerah harus diperhitungkan.

Tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menilai akuntabilitas dan memperoleh informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan, baik yang berkaitan dengan aspek ekonomi, sosial, dan lain-lain untuk disampaikan kepada masyarakat. Laporan keuangan pemerintah daerah dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang pendapatan, belanja, keuangan, aset, kewajiban, modal, dan arus kas suatu pemda.

Pelaksanaan kewenangan pihak berkuasa angkasa yang diatur bagian dalam UU No 23 Tahun 2014 perihal Pemerintahan Daerah dan UU No 33 Tahun 2004 perihal Perimbangan Keuangan seslat Pemerintah Pusat dan Daerah memunculkan nasib baik dan pikulan keuangan yang terukur. Oleh karena itu, teristiadat adanya pemerintahan keuangan angkasa bagian dalam esa sistem. Selain itu, pemerintahan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan angkasa ambang hari 2018 didasarkan ambang Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 perihal Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 perihal SAP, dan perkara perundang-bujukan Menteri lainnya. Selain itu, bagian dalam Nota Kesepahaman antara Pemkab Magelang dan DPRD Kabupaten Magelang perihal Kebijakan Umum APBD Kabupaten Magelang Tahun 2019 disebutkan bisa dijadikan acuan.

Untuk menjamin kebenaran dan tanggung jawab pemerintahan keuangan daerah, pemerintah daerah secara rutin membuat laporan pertanggungjawaban keuangannya. Dokumen ini telah disiapkan sesuai dengan waktu dan standar

akuntansi pemerintah. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2007 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap lembaga pelapor wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan kinerja sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tanggung jawab pemenuhan pendapatan dan belanja daerah.

Pemkab Magelang termasuk dalam kategori entitas pelapor yang bertanggung jawab menyusun dan menyajikan. Laporan keuangan pemerintah daerah meliputi Laporan Pelaksanaan Anggaran, Laporan Perubahan Surplus atau Defisit Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Tujuannya untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kinerja keuangan dan pemanfaatan sumber daya publik Pemerintah Kabupaten Magelang

B. PEMBAHASAN

Laporan keuangan pemda mencakup Laporan Pelaksanaan Anggaran, Laporan Perubahan Surplus atau Defisit Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Tujuannya untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kinerja keuangan dan pemanfaatan sumber daya publik Pemerintah Kabupaten Magelang.

Berdasarkan informasi yang didapat dari data Kabupaten Magelang, Pemerintahan Magelang memiliki Pendapatan pada tahun 2018 sebesar RP. 2.302.190.543.616,00, tahun 2019 sebesar RP. 2.575.439.825.755,00, dan Belanja daerah pada tahun 2018 RP. 2.486.540.561.169,00, tahun 2019 sebesar RP. 2.568.593.603.007,00

Pendapatan

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun 2019 (Audited)			Realisasi Tahun 2018 (Audited) (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi(Rp)	%	
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	441.347.020.000,00	417.178.099.961,00	94,52	325.089.093.092,00
2	Pendapatan Transfer	2.085.847.921.000,00	2.063.644.057.920,00	98,94	1.887.644.229.675,00
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	116.907.400.000,00	94.617.667.874,00	80,93	89.457.220.849,00
	Jumlah	2.644.102.341.000,00	2.575.439.825.755,00	97,40	2.302.190.543.616,00

Belanja

No	Belanja	Tahun 2019 (Audited)			Tahun 2018 (Audited)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
1	Belanja Operasi	1.688.380.335.036,00	1.498.077.962.197,00	88,73	1.454.440.752.541,00
2	Belanja Modal	475.141.984.218,00	386.529.995.844,00	81,35	501.727.375.261,00
3	Belanja Tak Terduga	3.043.828.500,00	73.755.000,00	2,42	946.000.000,00
4	Transfer	688.169.174.328,00	683.911.889.966,00	99,38	529.426.433.367,00
Jumlah		2.854.735.322.082,00	2.568.593.603.007,00	89,98	2.486.540.561.169,00

1. Rasio Kemandirian

Analisis terhadap indikator keuangan yang disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan pendekatan untuk mempelajari kinerja keuangan dan pengelolaan kas pemerintah daerah pada tingkat ini.

Rasio keuangan merupakan indikator khusus yang digunakan dalam audit untuk mengevaluasi berbagai aspek kondisi keuangan.

Penggunaan audit dengan pendekatan analisis rasio dalam pelaporan keuangan merupakan praktik umum di berbagai lembaga dan organisasi yang berorientasi bisnis.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah} \times 100\%}{\text{Total Pendapatann}}$$

Semakin tinggi angka independensi setiap tahunnya, semakin kuat bukti bahwa Pemerintah Kabupaten Magelang melakukan pengelolaan fiskal secara mandiri.

Tabel 1. Perbandingan Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian Keuangan	Kemandirian%	Pola Hubungan
Rendah sekali	0% - 25%	Intruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

2. Rasio Efektivitas PAD

Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator yang mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai pendapatan yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi perekonomian daerah.

Efektivitas PAD dapat diukur dengan membandingkan realisasi awal pendapatan daerah dengan target yang telah ditetapkan.

Tingkat efektivitas yang tinggi mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam memenuhi atau melampaui target pendapatan daerah yang direncanakan.

$$\text{Rasio Efektivitas Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Anggaran Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 2. Kriteria Efektivitas

Kreteria Efektif	Presentase Efektif
Sangat Efektif	>100%
Efektif	100%
Cukup Efektif	90 - 99%
Kurang Efektif	75- 89%
Tidak Efektif	<75%

3. Rasio Keserasian

Rasio harmonisasi merupakan indikator yang menjelaskan bagaimana pemerintah daerah membuat prioritas ketika menentukan alokasi sumber daya untuk belanja daerah dengan membandingkan total belanja perusahaan dengan total belanja sebenarnya.

Asosiasi ini mencerminkan tingkat efisiensi pemerintah daerah dalam mengalokasikan sumber daya untuk menutupi biaya operasional organisasi lokal dan pengeluaran daerah lainnya.

Sebagai bagian dari penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah, harmonisasi angka-angka penting memberikan informasi penting mengenai efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Rasio ini dapat digunakan untuk menilai seberapa selaras alokasi anggaran pemerintah daerah dengan prioritas belanja yang telah ditetapkan.

Hubungan harmonis tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut.

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

Rasio investasi dapat dijelaskan sebagai berikut. Rasio Investasi merupakan perbandingan total realisasi belanja modal terhadap total belanja daerah.

belanja modal mencakup pengeluaran untuk tanah, pabrik, mesin, bangunan, struktur, dan aset tetap lainnya. Rasio ini mengukur porsi belanja modal terhadap total belanja daerah dan mencerminkan kinerja fiskal pemerintah daerah dalam mengalokasikan dan mengelola belanja modal secara efisien.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penggunaan pendekatan kualitatif dalam metode deskriptif ini dipilih sesuai dengan kebutuhan penelitian dimana peneliti ingin menjelaskan hasil analisis rasio keuangan Pemda Kabupaten Magelang. Sampel atau data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Magelang. Data, termasuk data tahun anggaran, dapat diakses melalui PEMKAB Magelang. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder dari berbagai sumber seperti buku, internet, majalah, dan artikel. Data sekunder ini berperan penting dalam menunjang kelancaran proses penelitian

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Rasio Kemandirian

Derajat kemandirian Kemandirian merupakan ukuran kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan, pembangunan, dan pelayanan pemerintahan.

daerahnya sendiri melalui kontribusi pajak dan bea sebagai sumberpendapatan daerah.

Perhitungan rasio ini dilakukan dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total pendapatan Pemkab Magelang.

Hal ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$\begin{aligned} \text{Rasio Kemandirian (2018)} &= \frac{325.089.093.092}{2.302.190.543.616} \times 100\% \\ &= 14.12\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio Kemandirian (2019)} &= \frac{417.178.099.961}{2.575.439.825.755} \times 100\% \\ &= 16.19\% \end{aligned}$$

Informasi tingkat kemandirian pendapatan asli daerah (PAD) yang terdapat pada tabel analisis menyatakan bahwa Kabupaten Magelang masih sangat bergantung pada dukungan Pusat dan provinsi. Meski terjadi peningkatan dari tahun 2018 ke tahun 2019, namun proporsi masyarakat yang membutuhkan perawatan justru meningkat pada periode tersebut. Tingginya dukungan dari Pusat dan provinsi menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kemandirian pendapatan daerah yang melekat pada pemda Kabupaten Magelang.

2. Rasio Efektivitas

Rasio Efisiensi Fiskal Daerah merupakan parameternyang menilai kemampuan pemda dalam mencapai pendapatan primer daerah (PAD) sesuai rencana yang dibuat, dibandingkan dengan tujuan yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Parameter ini memberikan gambaran seberapa efektif pemerintah daerah mengelola dan meningkatkan pendapatan daerahnya.

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektifitas Pendapatan (2019)} &= \frac{417.178.099.961}{441.347.020.000} \times 100\% \end{aligned}$$

$$= 94,52\%$$

3. Rasio Keserasian

Derajat harmonisasi merupakan parameter perekonomian yang mencerminkan pendekatan pemerintah provinsi terhadap alokasi belanja modal dan sumber daya pembangunan daerah. Rasio ini dihitung dengan membandingkan jumlah belanja harian atau operasional yang sebenarnya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPBD) atau total biaya daerah. Rasio kecukupan memberikan perspektif tentang seberapa efektif pemerintah daerah dapat menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mendukung operasional negara, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Selain itu, rasio ini dapat digunakan untuk mengevaluasi efisiensi perekonomian suatu kota atau membandingkan efisiensi perekonomian suatu wilayah dengan wilayah lainnya.

$$\begin{aligned} \text{Rasio Belanja Modal (2018)} &= \frac{501.727.375.261}{2.486.540.561.169} \times 100\% \\ &= 20.17\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio Belanja Modal (2019)} &= \frac{386.529.995.844}{2.568.593.603.000} \times 100\% \\ &= 15.04\% \end{aligned}$$

D. Kesimpulan

Dalam kurun waktu 2018-2019 diketahui kegiatan pemerintahan daerah Kabupaten Magelang berhasil menunjukkan efisiensi yang baik. Hal ini terlihat

dari upaya Kabupaten Magelang dalam meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah yang dinilai sangat efektif. Namun pada tahun 2019, operasional pemerintahan daerah Kabupaten Magelang mengalami perbaikan yang tercermin dari hasil pengelolaan kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan perhitungan rasio efisiensi, Badan Pendapatan, Keuangan, dan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Magelang mampu mencapai tujuan memperoleh pendapatan utama daerah (PAD) dengan tingkat efisiensi melebihi 100 persen pada periode 2018-2019. . Sementara itu, sasaran operasional dan belanja anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang periode 2018-2019 dinilai cukup efektif. Berdasarkan perhitungan rasio efisiensi, Dinas Pendapatan, Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Magelang; mengelola anggaran dengan baik dan menggunakannya sebagaimana mestinya dengan tingkat efisiensi kurang dari 100 persen.

DAFTAR PUSTAKA

Pemerintahan Kabupaten Magelang 2018-2019. *Catatan atas laporan keuangan pemkab Magelang 2018 dan 2019*

L Natalia, TD Astuti. Analisis Laporan Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintahan Kabupaten Sleman. *Jurnal SosioHumaniora*, 2015 - ejurnal.mercubuana-yogya.ac.id

